

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara berkembang, yang menjadi perhatiannya yaitu pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, namun untuk bisa berjalan bersamaan antar keduanya dirasa hampir sulit untuk diwujudkan. Terutama jika hanya mengutamakan salah satunya saja pasti akan mengorbankan yang lainnya. Pembangunan ekonomi disuatu negara bisa memberikan dampak positif bahkan negatif bagi kondisi perekonomian suatu negara. Dampak yang sering terjadi dari adanya proses pembangunan ekonomi yaitu dapat menimbulkan ketimpangan antar wilayah atau daerah. Ketimpangan antar daerah kerap kali terjadi dan dapat menimbulkan permasalahan yang cukup serius bagi pertumbuhan ekonomi antar daerah tersebut. Seperti halnya, terdapat daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang bergerak lambat, tetapi ada juga daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan.

Ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang tidak hanya dihadapi oleh negara berkembang saja seperti Indonesia, tetapi negara-negara maju pun juga tidak luput dari masalah ini. Masalah ketimpangan pendapatan telah menjadi perhatian yang serius, islam dengan tegas memerintahkan kepada pihak yang berwenang (pemerintahan) untuk meminimalkan kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan. (Sukirno, 2008)

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT di Al-Qur'an Surah Al-Hasyr Ayat: 7

وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَىٰ وَالزُّبُرَىٰ وَلِذِي الرَّسُولِ لِأَهْلِهَا مِنَ الرَّسُولِ عَلَى اللَّهِ أَفَاءٌ مَّا  
عَنْهُ نَهَيْتُمْ وَمَا فَخَذُوهُ الرَّسُولُ أَنفُسُهُمْ وَمَا مِنْكُمْ إِلَّا غَنِيَاءٌ بَيْنَ دَوْلَةٍ يَكُونُ لَا كَيْ السَّبِيلِ وَالْبَن  
الْعَقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا فَانْتَهُوا

Artinya :

*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya*

Ayat diatas memiliki kandungan mengenai distribusi pendapatan, agar harta tidak hanya berputar pada orang-orang tertentu saja, disini pemerintah sebagai pihak yang berwenang memegang perananan penting melalui keputusan atau kebijakan-kebijakan yang diterapkan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga menghasilkan pemerataan pendapatan atau dengan kata lain mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan

Ukuran yang di pakai untuk mengetahui ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan adalah koefisien gini atau indeks gini yang berkisar antara nol sampai satu. Indek gini sebesar nol menunjukkan kemertaan sempurna dimana semua orang mempunyai pendapatan yang hampir sama besarnya. Sedangkan indeks gini sebesar 1 menunjukkan ketidakmerataan yang sempurna (Hudiyanto, 2017).

Sejarah dunia menunjukkan bahwa wilayah yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan dan keuangan yang lengkap dengan segala pendukungnya secara alami dapat menarik kegiatan ekonomi di wilayah tersebut dan menjadi magnet tersendiri untuk meningkatkan pembangunan dan sosial (Tambunan, 2018).

Pulau Jawa merupakan pusat dari pemerintahan dan perekonomian dengan kondisi seperti ini, pembangunan ekonomi di pulau Jawa terbukti pesat. Hal ini dibuktikan dengan pulau Jawa adalah penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2019 dengan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 59,15 persen di Indonesia. Tetapi tingkat ketimpangan pendapatan yang ada di pulau Jawa ternyata cukup tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia.

**TABEL 1.1**  
**Provinsi Dengan Ketimpangan Pendapatan Tertinggi**  
**Tahun 2019**

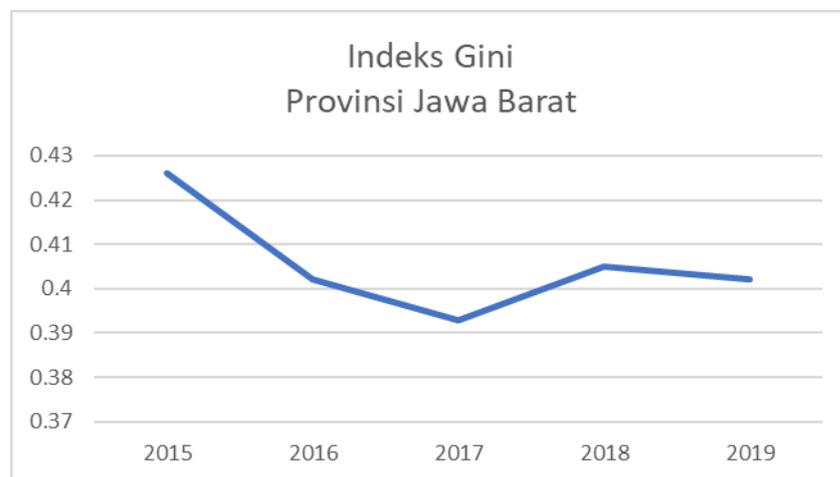
No	Provinsi	Indeks Gini
1	DI Yogyakarta	0,423
2	Gorontalo	0,407
3	Jawa Barat	0,402
4	Sulawesi Tenggara	0,399
5	DKI Jakarta	0,394

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 provinsi yang ada di Pulau Jawa termasuk kedalam 5 besar provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia. Tiga provinsi yang ada di Pulau Jawa dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi yaitu Provinsi DI Yogyakarta dengan indeks gini 0.423, Provinsi DKI Jakarta dengan indeks

gini 0,394 termasuk didalamnya adalah provinsi Jawa Barat dengan indeks gini 0,492

Jawa Barat merupakan provinsi yang menempati urutan ketiga ketimpangan pendapatan secara nasional. Meskipun dalam rentang waktu 5 tahun dari 2015 – 2019 angka ketimpangan di Jawa Barat relatif mengalami penurunan.



Sumber : Badan Pusat Statistik

**GAMBAR 1.1**  
**Ketimpangan Pendapatan Jawa Barat**  
**Tahun 2015 – 2019**

Distribusi pendapatan dapat ditingkatkan melalui pembangunan ekonomi. Peralnya, pembangunan ekonomi dapat mendorong peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan distribusi pendapatan masyarakat.

Untuk memahami berhasil tidaknya pembangunan ekonomi dan mengukur kinerja suatu daerah dapat dilakukan dengan mengukur laju

pertumbuhan ekonomi. Pengukuran ini didasarkan dengan meningkatnya angka Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari waktu ke waktu di mana peningkatan angka ini merupakan hasil utama dari pembangunan ekonomi. Berikut adalah data PDRB provinsi Jawa Barat dari tahun 2017 sampai 2019.

**TABEL 1.2**  
**PDRB ADH Konstan dan Laju Pertumbuhan PDRB**  
**Di Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)</b>	<b>Laju Pertumbuhan PDRB (persen)</b>
2017	1343662141,83	5,33
2018	1419624140,04	5,65
2019	1491575953,74	5,07

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa PDRB di Provinsi Jawa Barat selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB pada tahun 2017 menunjukkan angka sebesar 1343662141,83 juta rupiah dan terus meningkat hingga tahun 2019 sebesar 1491575953,74 juta rupiah.

Teori *trickle-down effect* pertama kali dikemukakan oleh Arthur Lewis (1954) yang mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara otomatis akan membawa pemerataan kesejahteraan. Dalam arti tertentu, kemajuan yang dicapai oleh sekelompok masyarakat kelas atas secara otomatis akan mengalir ke masyarakat kelas bawah melalui penciptaan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi lainnya, yang pada gilirannya akan mendorong kondisi dimana terciptanya output yang nantinya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang merata.

Indeks Pembangunan Manusia di suatu daerah menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Ketika Indeks Pembangunan Manusia meningkat berarti terjadi peningkatan juga terhadap pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat. Sehingga peningkatan IPM akan berdampak pada penurunan ketimpangan pendapatan. Tinggi rendahnya Indeks Pembangunan Manusia akan menentukan tingkat produktivitas penduduk. Tingkat IPM yang rendah akan menyebabkan produktivitas penduduk juga akan menjadi rendah. Ketika produktivitas seseorang rendah maka akan berdampak pada rendahnya pendapatan yang akan diterima. Sebaliknya, jika Indeks Pembangunan Manusia tinggi maka produktivitas akan tinggi pula dan pendapatan yang akan diperoleh juga akan meningkat (Kusuma dkk., 2019).

**TABEL 1.3**  
**Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2017-2019**

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)
2017	70,69
2018	71,30
2019	72,03

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan setiap tahun. IPM dikategorikan menjadi 3 yaitu bila indeks pembangunan manusia  $> 80$  dikategorikan sangat tinggi, bila indeks pembangunan manusia berada diantara angka 70-80 dikategorikan tinggi dan bila indeks pembangunan manusia berada diantara angka 60-70 dikategorikan sedang. Pada tahun 2019 indeks pembangunan

manusia meningkat 72,03 dari 70,69 pada tahun 2017. Indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017 juga masuk ke dalam kategori indeks pembangunan manusia yang tinggi.

Kondisi ketimpangan distribusi pendapatan tidak bisa dilepaskan dari keadaan demografis dan ketenagakerjaan. Hasil penelitian (Akai dan Sakata, 2005). menunjukkan bahwa penduduk merupakan salah satu penyebab meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan.

**TABEL 1.4**  
**Pengangguran di Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2017-2019**

Tahun	Pengangguran (jiwa)	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
2017	1.921.987	8.49
2018	1.857.425	8.16
2019	1.841.756	7.73

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data pada Tabel 1.4 diatas menggambarkan kondisi ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami penurunan.

Pengangguran dan kemiskinan juga mempunyai peran penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi. Peningkatan pengangguran memiliki dampak yang memberatkan pada ketimpangan pendapatan (Cysne dan Turchick dalam Hindun dkk., 2019), oleh sebab itu dengan mengurangi pengangguran, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi dapat dikurangi. Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan

pendapatan. Pengangguran terbuka akan menambah jarak pemisah antara penduduk miskin dan kaya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat secara nasional pada agustus 2019 menempati urutan kedua setelah Provinsi Banten dengan poin 7,99%. Tingginya pengangguran di Jawa Barat dipengaruhi oleh kondisi industri. Jawa Barat memiliki jumlah industri yang besar sehingga menarik penduduk dari luar Jawa Barat untuk pindah ke provinsi tersebut. Banyaknya migrasi di sektor industri menyebabkan lapangan pekerjaan berkurang. Keadaan tersebut akan menyebabkan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat semakin meluas. Oleh karena itu, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Pemerintah harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk mengurangi pengangguran dan mempekecil ketimpangan pendapatan di Jawa Barat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aguslim (2016) dengan judul “Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Desentralisasi di Indonesia”. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan penelitian yaitu menggunakan variabel PDRB. Perbedaan terletak pada metode analisis data menggunakan analisi linear berganda sedangkan peneliti menggunakan analisis data panel dan juga pada studi kasus di Indonesia, sedangkan peneliti studi kasus Di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dkk., (2019) dengan judul “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017”. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, variabel Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan penelitian yaitu menggunakan variabel IPM dan juga menggunakan teknik analisis regresi data panel. Perbedaan terletak pada studi kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan peneliti studi kasus Di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Masruri (2016), dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ipm, Tpak Dan Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014”. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dan variabel TPAK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun

persamaan penelitian yaitu menggunakan variabel IPM dan pengangguran dan juga menggunakan teknik analisis regresi data panel. Perbedaan terletak pada studi kasus di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan peneliti studi kasus Di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2019”. Besarnya tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pengangguran.

#### **B. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini, peneliti membatasi variabel-variabel yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Variabel dependen yang digunakan adalah ketimpangan pendapatan setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2015-2019.
2. Variabel independen yang digunakan adalah PDRB, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran terbuka setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2015-2019.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat.

2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana pengaruh Pengangguran Terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang ingin dicapai untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Pengangguran Terbuka terhadap ketimpangan pendapatab di Provinsi Jawa Barat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan terkait masalah ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, sehingga pendapatan yang diperoleh akan merata dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis menjadi bahan refensi dalam pengembangan keilmuan khususnya terkait dengan masalah ketimpangan pendapatan dan diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan membahas terkait dengan ketimpangan pendapatan